

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107° Bujur Timur dan 60, 55 ° Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan karena, Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya, selain itu letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah.

Kota Bandung menurut Registrasi Penduduk sampai dengan bulan Maret 2004 berjumlah : 2.510.982 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,67 Km²), sehingga kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Komposisi penduduk warga negara asing yang berdomisili di Kota Bandung adalah sebesar 4.301 jiwa. Jumlah warga negara asing menurut catatan Kantor Imigrasi Bandung yang berdiam tetap di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 2.511

orang, sedangkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 5.849 jiwa.

Dari Program Pemerintah dalam hal mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi khususnya di Kota Bandung telah dilaksanakan Program Transmigrasi ke luar Pulau Jawa dengan jenis transmigrasi terbesar adalah Transmigrasi TU sebanyak 76 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 86, sedangkan daerah tujuan Transmigrasi TU adalah Propinsi Riau dan Kalimantan tengah.

Dalam hal membuka kesempatan kerja yang ada pada Bursa Kesempatan Kerja jumlah kesempatan yang paling tinggi adalah dari lulusan SMU. Nampaknya dalam hal ini Pemerintah tetap harus bekerja keras dalam penyediaan lapangan pekerjaan, selain lowongan yang ada terus diciptakan dan kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan.

Walaupun subjek penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, namun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah auditor fungsional yang memiliki sertifikasi pada Inspektorat Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan karena auditor fungsional sebagai pengawas intern mengetahui tahap-tahap perencanaan keuangan daerah, selain itu auditor fungsional bisa mengetahui apakah akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik atau belum melalui proses-proses pengawasan yang dilakukannya.

Auditor fungsional yang terdapat pada Inspektorat Kota Bandung berjumlah 19 orang. Dari biodata yang terdapat pada kuesioner, auditor fungsional yang dijadikan responden oleh penulis, telah memiliki masa kerja kurang lebih

selama 10 tahun. Dari 19 auditor yang mengisi kuesioner penelitian ini, hanya terdapat empat orang yang berjenis kelamin wanita, sedangkan sisanya didominasi oleh kaum pria, dengan kisaran umur 35-50 tahun. Untuk lebih rinci ditunjukkan secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Demografi Responden

	Keterangan	Frekuensi
Jenis Kelamin	Laki-laki	15
	Perempuan	4
Usia	25-35	6
	36-46	10
	47-50	3
Jenjang Pendidikan	SLTA/Sederajat	0
	D3	0
	S1	8
	S2	11
Lama Jabatan Fungsional	1-2 Tahun	3
	3-5 Tahun	4
	6-10 Tahun	10
	>10 Tahun	2

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4.1.2. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Data variabel dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang berhubungan dengan variabel independen yaitu pengawasan intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen.

Agar penelitian tidak bias atau tidak diragukan lagi kebenarannya, maka instrumen kuesioner sebagai alat pengukuran variabel penelitian harus memenuhi dua syarat utama yaitu instrumen penelitian harus valid (benar, dapat dibuktikan)

dan reliabel (benar, dapat dipercaya). Untuk itu terhadap kuesioner yang diberikan kepada responden dilakukan dua macam uji yaitu uji validitas dan uji reabilitas

Berikut ini akan dipaparkan hasil dari kedua macam uji tersebut terhadap data yang didapat dari kuesioner:

a. Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam mengumpulkan data. Dengan instrumen seperti ini maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid.

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan pengujian validitas konstruk karena instrumen kuesioner yang digunakan adalah untuk mengukur sikap (*nontest*). Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pernyataan dengan skor total, selanjutnya interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan, bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan r tabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas yang baik.

Dari hasil pengeolahan data, diketahui bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Dari 20 pernyataan untuk mengukur variabel X dan 24 pernyataan untuk variabel Y semuanya dinyatakan valid. Setiap pernyataan yang valid dianggap telah mewakili semua unsur indikator dari tiap variabel. Adapun tabel yang menggambarkan item yang valid variabel X dan Y sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengujian Validitas Variabel X

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket
1	0,43	0,3	valid
2	0,62	0,3	valid
3	0,58	0,3	valid
4	0,69	0,3	valid
5	0,73	0,3	valid
6	0,88	0,3	valid
7	0,75	0,3	valid
8	0,76	0,3	valid
9	0,64	0,3	valid
10	0,78	0,3	valid
11	0,69	0,3	valid
12	0,88	0,3	valid
13	0,67	0,3	valid
14	0,49	0,3	valid
15	0,8	0,3	valid
16	0,51	0,3	valid
17	0,66	0,3	valid
18	0,73	0,3	valid
19	0,79	0,3	valid
20	0,78	0,3	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.3
Pengujian Validitas Variabel Y

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Ket
1	0,5	0,3	valid
2	0,8	0,3	valid
3	0,89	0,3	valid
4	0,58	0,3	valid
5	0,91	0,3	valid
6	0,74	0,3	valid
7	0,83	0,3	valid
8	0,87	0,3	valid
9	0,76	0,3	valid
10	0,84	0,3	valid
11	0,79	0,3	valid
12	0,84	0,3	valid

Lanjutan Tabel 4.3

13	0,79	0,3	valid
14	0,84	0,3	valid
15	0,8	0,3	valid
16	0,86	0,3	valid
17	0,91	0,3	valid
18	0,89	0,3	valid
19	0,74	0,3	valid
20	0,77	0,3	valid
21	0,86	0,3	valid
21	0,62	0,3	valid
23	0,89	0,3	valid
24	0,89	0,3	valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Penulis menggunakan perhitungan koefisien *Alpha Cronbach*, selanjutnya hasil dari perhitungan *Alpha Cronbach's* tersebut dibandingkan dengan ketentuan reliabel jika nilai *Alpha* yang dihasilkan memberi nilai $Alpha > 0,60$.

Dari pengolahan variabel Pengawasan Intern (X) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* sebesar 0,944 maka kuesioner untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena nilai nilai *Alpha Cronbach's* lebih besar dari 0,60. Tampak pada hasil perhitungan dengan program SPSS berikut ini :

Tabel 4.4
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.944	20

Berikutnya untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) diperoleh nilai *Alpha Cronbach's* sebesar 0,976 atau lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliabel. Seperti tampak pada hasil perhitungan SPSS berikut ini :

Tabel 4.5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.976	24

4.1.2.1. Deskripsi Variabel Pengawasan Intern

Pengawasan Intern dilakukan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan intern di daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung yang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Daerah. Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, maka selanjutnya penulis akan membahas data tersebut berdasarkan setiap proses dari pengawasan intern. Terdapat 20 item pernyataan dalam kuesioner tersebut yang berbentuk tabel. Berikut ini adalah hasil jawaban yang diberikan dari penyebaran kuesioner tersebut.

Tabel 4.6
Perhitungan Frekuensi Jawaban Untuk Variabel X

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5	4	3	2	1		
1	13	6				89	95
2	16	3				92	95
3	13	6				89	95
4	12	7				88	95
5	9	6	4			81	95
6	12	7				88	95
7	9	10				85	95
8	10	5	3			79	95
9	8	10	1			81	95
10	9	9	1			82	95
11	10	9				86	95
12	11	8				87	95
13	11	8				87	95
14	11	8				87	95
15	9	9	1			82	95
16	9	10				85	95
17	11	7	1			86	95
18	10	6	3			83	95
19	9	7	2	1		81	95
20	10	6	2	1		82	95
Jumlah						1715	1900

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah skor yang diperoleh dari variabel ini adalah 1715, jadi berdasarkan data itu maka tingkat Pengawasan Intern dapat dihitung dengan cara membandingkan antara skor variabel yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara perhitungannya :

$$(1715 : 1900) \times 100\% = 90,26 \%$$

Bila hasil tersebut dilihat dengan tabel interpretasi skor (tabel 4.7), maka hasil tersebut berada pada kategori sangat baik. Hal ini dapat dikatakan juga

bahwa Pengawasan Intern Kota Bandung yang dihasilkan sudah sangat baik, karena sudah sesuai dengan kriteria indikator yang ada.

Hasil pengolahan tersebut dibandingkan dengan tabel interpretasi skor sebagai berikut :

Tabel 4.7
Interpretasi Skor

Hasil	Kategori
20% - 35,99%	Tidak Baik
36% - 51,99%	Kurang Baik
52% - 67,99%	Cukup Baik
68% - 83,99%	Baik
84% - 100%	Sangat Baik

Sumber : Sugiyono (2009)

Dari tabel tersebut angka 90,26 % berada pada kisaran 84% - 100% yang memiliki kategori sangat baik. Sehingga dapat diartikan bahwa Pengawasan Intern yang dilakukan di Kota Bandung dinilai sangat baik, karena sudah terpenuhinya dimensi-dimensi pengawasan intern mulai dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Selanjutnya mulai dari Tabel 4.8 sampai dengan 4.12 penulis akan menguraikan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai variabel pengawasan intern perdimensinya.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Audit

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	13	62,25%	6	33,11%	0	4,63%	0	0%	0	0%	19
2	16		3		0		0				
3	13		6		0		0				
4	12		7		0		0				
5	9		6		4						
6	12		7								
7	9		10								
8	10		5		3						
Total	94		50		7		0		0		151

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel tersebut menjelaskan bahwa jawaban pada soal nomor 1 sampai 8 dengan kriteria selalu mencapai 62,25 %, besaran angka ini didapat dari perhitungan membandingkan jumlah jawaban untuk setiap kriteria dengan jumlah total jawaban semua kriteria, begitu pula untuk dimensi-dimensi selanjutnya. Untuk kriteria sering mencapai 33,11%.. Pada kriteria kadang-kadang mencapai 4,63%, sedangkan jarang dan tidak pernah ada satu pun responden yang menjawab. Hal ini dapat diartikan bahwa proses audit telah memenuhi indikator-indikator yang ada.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa auditor fungsional memahami tatacara menentukan sasaran pemeriksaan, lalu auditor terlibat dalam pengumpulan dan penelaahan data informasi umum, auditor terlibat dalam penuangan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan serta auditor terlibat

dalam pembicaraan timuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh tanggapan dari obyek yang diperiksa.

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Review

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
9	8		10		1		0		0		19
10	9		9		1		0		0		
11	10	46,55%	9	48,27%	1	5,17%	0	0%	0	0%	
Total	27		28		3		0		0		58

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi *review*, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 46,55%. Untuk kriteria sering mencapai 48,27%. Untuk kriteria kadang-kadang mencapai 5,17%. Untuk kriteria jarang serta tidak pernah tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria tersebut. Berdasar perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa *review* yang telah dilakukan oleh pengawas intern telah memenuhi indikator-indikator yang ada.

Data tersebut menggambarkan bahwa auditor fungsional memahami dan terlibat dalam perencanaan proses *review*, auditor fungsional pun terlibat dalam penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan Pemerintah Kota Bandung, serta auditor fungsional terlibat dalam menelaah kualitas kertas kerja pemeriksaan.

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Evaluasi

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
12	11		8		0		0		0		19
13	11		8		0		0		0		
14	11	57,89%	8	42,10%	0	0%	0	0%	0	0%	
Total	33		24		0		0		0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi evaluasi, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 57,89%. Untuk kriteria sering mencapai 42,10%.. Untuk kriteria kadang, jarang serta tidak pernah tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria tersebut. Berdasar perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa evaluasi yang telah dilakukan oleh auditor dalam memenuhi proses pengawasan, telah memenuhi indikator-indikator yang ada.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa auditor fungsional memahami perencanaan tindakan evaluasi, selain itu auditor fungsional terlibat dalam membandingkan hasil suatu kegiatan di Pemerintah Kota Bandung dengan standar yang telah ditetapkan juga menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta auditor fungsional terlibat dalam membuat tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Pemantauan

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
15	9		9		1		0		0		19
16	9		10		0		0		0		
17	11	50,87%	7	45,61%	1	3,5%	0	0%	0	0%	
Total	29		26		2		0		0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi pemantauan, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 50,87%. Untuk kriteria sering mencapai 45,61%. Untuk kriteria kadang mencapai 3,5%, sedangkan untuk kriteria jarang serta tidak pernah tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria tersebut. Berdasar perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa pemantauan yang telah dilakukan oleh auditor fungsional dalam memenuhi proses pengawasan, telah memenuhi indikator-indikator yang ada.

Dari data tersebut penulis beranggapan bahwa auditor fungsional terlibat dalam memonitor pelaksanaan tindak lanjut dari hasil evaluasi, serta auditor fungsional mengetahui proses penilaian kemajuan suatu program Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas
Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
18	10		6		3		0		0		19
19	9		7		2		1		0		
20	10	50,87%	6	33,33%	2	12,28%	1	3,5%	0	0 %	
Total	29		19		7		2		0		

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi kegiatan pengawasan lainnya, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 50,87%. Untuk kriteria sering mencapai 33,33%. Untuk kriteria kadang mencapai 12,28 %, responden yang menjawab memilih kriteria jarang sebesar 3,5% serta tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria tidak pernah. Berdasarkan perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan pengawasan lainnya yang telah dilakukan oleh auditor fungsional dalam memenuhi proses pengawasan, telah memenuhi indikator-indikator yang ada.

Dari olahan data kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa auditor fungsional mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya, auditor fungsional pun terlibat dalam menilai perlu atau tidaknya dilakukan kegiatan pengawasan lainnya.

4.1.2.2. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut.

Data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini penulis peroleh juga dari hasil penyebaran kuesioner pada 19 auditor fungsional yang ada pada Inspektorat Kota Bandung. Dalam kuesioner kali ini terdapat 24 pernyataan yang tersaji dalam bentuk tabel.

Dalam kuesioner tersebut terdapat 24 item / pernyataan yang berbentuk tabel. Berikut ini adalah hasil jawaban yang diberikan dari penyebaran kuesioner tersebut :

Tabel 4.12
Perhitungan Frekuensi Jawaban Untuk Variabel Y

No Item	Frekuensi jawaban					Skor item	Skor Tertinggi
	5	4	3	2	1		
1	11	8				87	95
2	7	11	1			82	95
3	8	10	1			83	95
4	9	8	2			83	95
5	12	5	1	1		85	95
6	9	8	2			83	95
7	10	8	1			85	95
8	10	8	1			85	95
9	8	10	1			83	95
10	10	8	1			85	95
11	8	10	1			83	95
12	10	8	1			85	95
13	9	8	2			83	95
14	11	5	3			84	95
15	12	6	1			87	95
16	11	6	2			85	95
17	11	4	4			83	95
18	11	8				87	95
19	10	8	1			85	95
20	12	7				88	95
21	10	9				86	95
22	12	7				88	95
23	11	8				87	95
24	11	8				87	95
Jumlah						2039	2280

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian ini adalah 2040, jadi berdasarkan data itu maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara skor penelitian yang didapat dengan skor maksimal. Berikut ini adalah cara perhitungannya :

$$(2040 : 2280) \times 100\% = 89,42 \%$$

Bila hasil tersebut dilihat dengan tabel interpretasi skor (tabel 4.7), maka hasil tersebut berada pada kategori sangat baik / sangat efektif. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan sudah sangat baik. Kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel interpretasi (tabel 4.6) skor Sumber : Sugiyono (2009)

Menurut tabel tersebut angka 89,42% berada pada kisaran 84% - 100% yang memiliki kategori sangat baik. Sehingga dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicapai Pemerintah Kota Bandung dinilai baik, karena sudah terpenuhinya dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, serta akuntabilitas kebijakan.

Selanjutnya mulai dari Tabel 4.14 sampai dengan 4.18 penulis akan menguraikan jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perdimensinya.

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Akuntabilitas Keuangan

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	11	46,05%	8	48,68%	0	5,26%	0	0 %	0	0 %	19
2	7		11		1		0		0		
3	8		10		2		0		0		
4	9		8		2		0		0		
Total	35		37		4						76

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Analisis variabel yang diukur dengan dimensi akuntabilitas keuangan, ternyata keseluruhan jawaban responden mendekati ideal, yaitu jawaban pada soal nomor 1 sampai 4 dengan kriteria selalu mencapai 46,05 %, untuk kriteria sering mencapai 46,68%,. Pada kriteria kadang-kadang mencapai 5,26%, sedangkan jarang dan tidak pernah ada satu pun responden yang menjawab. Hal ini dapat diartikan bahwa akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik karena telah sesuai dengan kriteria indikator yang terdapat dalam dimensi akuntabilitas keuangan.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah kota Bandung memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik dalam mengelola keuangan, selain itu sumber-sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung tersaji secara transparan, lalu laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kota Bandung menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan, serta sistem pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah dan selalu di audit oleh auditor yang independen.

Tabel 4.15
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Akuntabilitas Kejujuran & Hukum

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
5	12		5		1		1		0		19
6	9		8		2		0		0		
7	10	51,57%	8	41,05%	1	6,31%	0	1,05%	0	0%	
8	10		8		1		0		0		
9	8		10		1						
Total	49		39		6		1				95

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 51,57%. Untuk kriteria sering mencapai 41,05%. Untuk kriteria kadang mencapai 6,31 %, responden yang menjawab memilih kriteria jarang sebesar 1,05% serta tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria tidak pernah. Berdasarkan perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik karena telah sesuai dengan kriteria indikator yang terdapat dalam dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum.

Hal ini berarti sumber-sumber penggunaan dana diketahui oleh para *stakeholder* selaku pengguna laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, selain itu adanya kesesuaian antara jabatan dan wewenang yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung pun memiliki kepatuhan

terhadap hukum yang berlaku dan Pemerintah Kota Bandung bertindak jujur dalam mengelola keuangan daerah.

Tabel 4.16
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Akuntabilitas Proses

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
10	10		8		1		0		0		19
11	8		10		1		0		0		
12	10	49,33%	8	45,33%	1	5,33%	0	0%	0	0%	
13	9		8		2		0		0		
Total	37		34		4						

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi akuntabilitas proses, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 49,33%. Untuk kriteria sering mencapai 45,33%. Untuk kriteria kadang mencapai 5,33 %, serta tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria jarang dan tidak pernah. Berdasarkan perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas proses yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik karena telah sesuai dengan kriteria indikator yang terdapat dalam dimensi akuntabilitas proses.

Dari data diatas, penulis beranggapan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki kecukupan sistem informasi akuntansi dalam mengelola keuangan daerah, lalu Pemerintah Kota Bandung memiliki kecukupan sisten informasi manajemen, serta melaksanakan prosedur administrasi dalam mengelola keuangan daerah.

Tabel 4.17
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Akuntabilitas Program

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
14	11	57,39%	5	32,17%	3	10,43%	0	0 %	0	0 %	19
15	12		6		2		0		0		
16	11		6		2		0		0		
17	11		4		4		0		0		
18	11		8								
19	10		8		1						
Total	66		37		12						115

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dimensi akuntabilitas program, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 57,39 %. Untuk kriteria sering mencapai 32,17%. Untuk kriteria kadang mencapai 10,43 %, serta tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria jarang dan tidak pernah. Berdasarkan perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas program yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik karena telah sesuai dengan kriteria indikator yang terdapat dalam dimensi akuntabilitas program.

Mengacu pada data tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian hasil dari setiap kegiatan/program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung selalu meningkat setiap tahunnya. Selain itu selalu ada pengawasan terhadap kegiatan/program Pemerintah Kota Bandung, pelaporan hasil kegiatan/ program kerja Pemerintah Kota Bandung disusun secara tepat waktu. Pemerintah Kota Bandung

pun memiliki kesesuaian antara targer dengan pencapaian kegiatan/program yang dilakukan.

Tabel 4.18
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas
Akuntabilitas Kebijakan/Prosedural

No	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah Responden
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
20	12		7				0		0		19
21	10		9				0		0		
22	12	58,94%	7	41,05%		0%	0	0%	0	0%	
23	11		8				0		0		
24	11		8								
Total	56		39								

Sumber: Hasil Pengolahan Data)

Untuk dimensi akuntabilitas kebijakan/ procedural, jawaban yang diberikan oleh sebagian besar responden yaitu berada pada kriteria selalu mencapai mencapai 58,94 %. Untuk kriteria sering mencapai a1,05%, serta tidak ada satu pun dari responden yang menjawab kriteria kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Berdasarkan perhitungan frekuensi jawaban dari responden tersebut dapat diartikan bahwa akuntabilitas kebijakan/prosedural yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik karena telah sesuai dengan kriteria indikator yang terdapat dalam dimensi akuntabilitas kebijakan/ prosedural.

Berdasarkan data tersebut, penulis beranggapan bahwa Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan kebijakan kedalam sasaran yang harus dicapai, lalu perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat akan

mempengaruhi proses penetapan kebijakan yang diambil/dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung. Selain itu Pemerintah Kota Bandung memiliki sasaran dan tujuan yang jelas dari kebijakan yang dibuat, serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dikembangkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik lagi.

4.1.2.3. Analisis Statistik

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, berikut adalah uraiannya :

1. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Tahap pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, serta menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada Bab I. Data hasil perhitungan kuesioner variabel –variabel tersebut adalah data yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis ini secara statistik, dimana hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Teknik statistik yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* untuk mengetahui hubungan antara variabel Pengawasan Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Pengawasan Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan perhitungan koefisien determinasi.

Berikut uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.00 *for window* :

Tabel 4.19
Correlations

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.901**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	19	19
Y	Pearson Correlation	.901**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	19	19

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi untuk variabel X (Pengawasan Intern) sebesar 0,901. Dari nilai korelasi *Pearson Product Moment* tersebut, menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah).

2. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh tersebut maka digunakan koefisien determinasi dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Kd &= (r)^2 \times 100\% \\
 &= (0,901)^2 \times 100\% \\
 &= 81,18\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas , diketahui nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 81.18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 81,18% Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh Pengawasan Intern, sedangkan sisanya sebesar 18,82 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari Pengawasan Intern.

4.2. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah dan rancangan hipotesis yang telah diajukan dalam Bab I, yaitu (1) Bagaimana pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung., dan (2) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta (3) Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Maka berikut ini adalah penjelasan penulis atas hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan statistika dengan bantuan *software SPSS 17.0 for windows* yaitu dengan menggunakan teknik. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment* untuk mencari hubungan variabel antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), Sedangkan untuk mencari bagaimana pengaruh antara variabel X ke variabel Y maka digunakan Koefisien Determinasi (Kd).

4.2.1. Pengawasan Intern di Pemerintah Kota Bandung

Dengan dilakukannya pengawasan intern maka diharapkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Pengawasan Intern dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan perhitungan yang disajikan sebelumnya bahwa dengan penilaian skala 0 % - 100%, pelaksanaan pengawasan Intern telah mencapai 90,26%. Hal ini dapat terjadi karena pada Pemerintah Kota Bandung Pengawasan Intern telah dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam peraturan pemerintah tersebut diketahui bahwa yang menjadi proses-proses pengawasan intern adalah audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Seluruh proses pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh para auditor fungsional yang terdapat dalam Inspektorat Kota Bandung.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Handayani (2008:12) pada pemerintah Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa, secara umum pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk menjamin agar suatu pekerjaan atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, secara khusus pengawasan harus dapat menilai ketaatan terhadap undang-undang, menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum, serta dapat mendeteksi adanya kecurangan. pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan.

4.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandung

Dalam memenuhi tuntutan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2005, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik .

Proses Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005, pasal 1). Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus diungkap secara akuntabel, karena menyangkut pengelolaan sumber daya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga yang disebut dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dinilai sangat baik, hal ini dapat diketahui melalui perhitungan yang dilakukan sebelumnya bahwa dengan penilaian skala 0 % - 100%, akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah 89,47%. Hal ini dapat terjadi karena akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan utuh dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun menurut Abdul Halim (2007: 87) ciri-ciri akuntabilitas yang baik antara lain :

- a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya termasuk pelayanan BUMN/D yang berada dibawah wewenangnya)
- b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur.
- c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit organisasi.
- d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi.
- e. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi
- f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irman Firmansyah (2008:14) menyatakan bahwa, salah satu unsur terpenuhinya konsep pengelolaan

keuangan daerah adalah apa yang dimaksud dengan akuntabilitas, akuntabilitas yang harus terpenuhi dalam sektor publik adalah akuntabilitas keungan, akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan teori diatas, bahwa ciri-ciri dari akuntabilitas yang baik adalah, akuntabilitas dilakukan secara menyeluruh, dapat digunakan dalam menilai kinerja manajemen, dibangun berdasarkan sistem informasi yang baik, serta adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

4.2.3. Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Bandung

Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara Pengawasan Intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung, maka dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis korelasi *Pearson Product Moment* pada bagian sebelumnya, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,901 . Dari nilai koefisien korelasi tersebut tersebut, menunjukkan adanya hubungan positif antara pengawasan Intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Setelah mengetahui adanya hubungan antara pengawasan Intern dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan Intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, untuk mengetahui berapa besar pengaruh tersebut

dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 81,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Intern memberikan kontribusi sebesar 81,18% dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sisanya sebesar 18,82% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah sebagai berikut ini:

Penetapan Hipotesis nol dan Hipotesis alternatif.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Positif antara Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Ha : Terdapat Pengaruh Positif antara Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Korelasi *Rank Pearson Product Moment* yang berarah positif serta nilai Koefisien Determinasi sebesar 81,18 %, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian Ha diterima dan Ho pun ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada penelitian ini responden berpendapat atau menilai bahwa pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang ada akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, merupakan elemen yang sangat penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengawasan intern menjadi elemen yang sangat penting dalam memantau dan mengawasi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pendapat yang dikemukakan penulis tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Abdul Halim (2007: 40) bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada, dalam hal ini unit yang dimaksud adalah Inspektorat Kota Bandung.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Handayani (2008:14) mengatakan bahwa, pengawasan sangat berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu semakin baik aparat pengawasan melakukan fungsinya, maka semakin mempermudah pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator-indikator yang terdapat pada fungsi pengawasan, mulai dari pengendalian, pemeriksaan, evaluasi, serta pelaporan. Nirmala Hanum (2008:81) pun berpendapat dalam penelitiannya, langkah-langkah seperti penentuan susunan tim, penentuan waktu pemeriksaan, pengumpulan informasi umum, dan pendalaman akan undang-undang yang terkait akan menghasilkan pengawasan yang lebih optimal, sehingga perwujudan akuntabilitas pun akan semakin mudah tercapai.

